

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



SALINAN

LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 8 TAHUN 2022
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 138);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
39. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
40. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);

41. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
42. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
44. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
45. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahann Atas Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022 Nomor 7) ;
46. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO
dan

LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANGUNJIWO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 8.716.826.042
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp. 9.044.125.994 -</u>
	Surplus/ Defisit	Rp. (327.299.952)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan pembiayaan	Rp. 427.299.952
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000 -</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 327.299.952

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
pada tanggal 29 Desember 2022

LURAH BANGUNJIWO

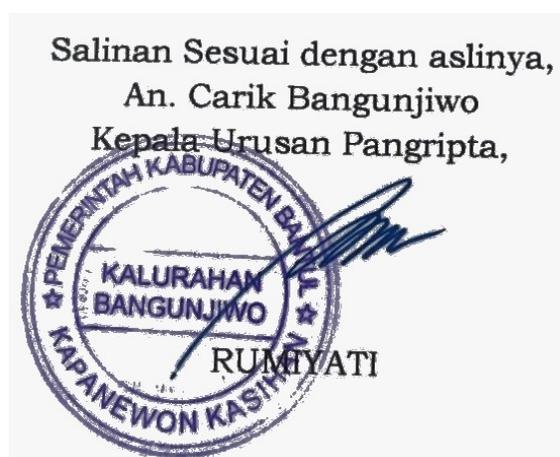
ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo
pada tanggal 29 Desember 2022
CARIK BANGUNJIWO

ttd

SUKARMAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 8

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul : (27/Bangunjiwo/2022)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.410.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	8.534.416.042,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	8.716.826.042,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.882.667.584,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.405.128.234,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.127.392,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.127.392,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.075.963.848,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.075.963.848,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.848.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.848.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	313.687.042,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.687.042,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	236.520.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.520.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	105.779.662,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	105.779.662,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	64.609.290,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	64.609.290,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	54.270.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	54.270.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	204.223.000,00	ADD, PBH
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	204.223.000,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	111.800.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	86.000.000,00	
1.1.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	126.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	78.500.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	29.500.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	29.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	103.854.604,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.800.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.150.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.850.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	76.054.604,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.054.604,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	205.929.746,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.947.106,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.947.106,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.180.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.880.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.072.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.072.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.102.140,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.102.140,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	14.725.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.725.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	97.822.500,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.822.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	11.801.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.801.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41.255.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	23.875.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.380.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>4.638.278.070,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	354.215.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	109.035.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.035.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.240.000,00	PBP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	208.340.000,00	BMP
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	208.340.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	12.600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	895.320.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	192.210.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.210.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	33.600.000,00	BMP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	514.200.000,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.200.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	5.400.000,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	75.460.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.460.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	11.650.000,00	PAD
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
2.2.98		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3.400.000,00	ADD
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.111.456.070,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.075.976.070,00	DDS, PBK, PMK, :
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	275.976.070,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.480.000,00	DDS, PMK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	145.480.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	860.000.000,00	PBK, PMK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.034.945.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	62.400.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	31.275.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	941.270.000,00	BMP, DDS, PBH,
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	801.270.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	33.460.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	3.500.000,00	BMP
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	29.960.000,00	BMP
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.960.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	208.882.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	167.387.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	167.387.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	41.495.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.495.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>677.692.896,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	248.390.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	142.200.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.200.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat. Skala Lokal Desa	9.500.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	32.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	13.040.000,00	PAD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	7.650.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	31.800.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	12.200.000,00	ADD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	295.080.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	47.100.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	232.980.000,00	PAD, PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.980.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	15.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.894.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	27.894.500,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.894.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	106.328.396,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	87.128.396,00	ADD, PAD, PBH
3.4.02	5.1.	Belanja Pegawai	22.228.396,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.200.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>524.784.789,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.583.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.800.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.800.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	22.840.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.840.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	73.443.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	73.443.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	23.500.000,00	PAD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.806.789,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	19.706.789,00	ADD, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.706.789,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	17.100.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.490.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.390.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.390.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.400.000,00	BMP
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.700.000,00	PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.4.91		Pembinaan/ Penyuluhan/ Pendampingan Korban Kekerasan/ KDRT/ Bina Keluarga	3.000.000,00	PAD
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	298.905.000,00	
4.7.02		Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa	218.205.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	218.205.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	55.900.000,00	PBP
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.900.000,00	
4.7.04		Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	24.800.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>320.702.655,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.028.396,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.028.396,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.028.396,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.474.259,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.474.259,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.474.259,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	289.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	12.000.000,00	DLL
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	277.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	9.044.125.994,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(327.299.952,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	427.299.952,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	327.299.952,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gendeng, 29 Desember 2022

Lurah

H. Parja, ST, MSi